

## Penguatan *Capacity Building* Pemerintah Kelurahan di Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kecamatan Mataram

Muhammad Ali<sup>1</sup>, Muhammad Aprian Jailani<sup>2</sup>, Asfarony Hendra Nazwin<sup>3</sup>, Nanda Erlambang<sup>4</sup>, Maulidiyan Firdaus<sup>5</sup>, Dita Fitriani<sup>6</sup>, Lira Asmaul Aulia<sup>7</sup>,

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram

<sup>4</sup> Dosen Universitas Pawayatan Daha, Jawa Timur

<sup>5,6,7</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram

---

### INFORMASI ARTIKEL

### Abstrak

#### Article History :

Dikirim tanggal : 25-03-2023

Revisi Pertama : 12-03-2023

Diterima : 04-04-2023

Tersedia Online : 27-04-2023

Fenomena yang menyebabkan *good governace* sulit dicapai salah satunya adalah masah lingkungan dalam mengatasi sampah, koodinasi anggaran sampah dari lingkungan ke kelurahan hingga kecamatan, sisi lain relasi antar actor pemerintahan masih rendah dan minim hingga pada sosialisasi masyarakat masih kurang optimal. Menghadapi beberapa masalah tersebut, diperlukan penguatan kapasitas (*capacity building*) yang meliputi *system* (*system*), pegawai/birokrasi (*individual*) dan oroganisasi/instansi (*entity*) untuk dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Hasil menunjukkan *capacity building* menjadi kebutuhan dan dasar dalam organisasi kelurahan, terutama dalam memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat.

**Kata Kunci :** *Penguatan, Capacity Building, Administrasi Pemerintahan.*

---

### PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi yang sedang dilakasnakan pemerintah belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak masalah yang dihadapi dalam mewujudkan *good governance* dan peningkatkan kinerja pemerintahan. Dari beberapa kasus yang terjadi, termasuk besarnya jumlah kerugian keungan negara yang ditimbulkan, menunjukkan belum optimalnya kinerja birokrasi yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya kinerja pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berbagai masalah lainnya dalam birokrasi yang belum terselesaikan sebagaimana uraian diatas berpengaruh besar terhadap rendahnya kapasitas birokrasi secara keseleuhruhan.

Tujuan *capacity building* adalah peningkatkan kemampuan, keterampilan, dan *attitude* pegawai sehingga lebih efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran / targer kinerja organisasi. Bentuk dari kegiatan *capacity building* nantinya adalah dengan jarapan kegiatan yang diadakan salah satu instansi semisalnya di kantor camat Kota Mataram berkoordinasi dengan salah satu sampel kelurahan pagutan untuk memberikan pemahaman, peningkatan Sumber daya

Manusia diberdayakan untuk siap dalam mengatasi permasalahan dan solusi terhadap suatu masalah.

Oleh karenanya, Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan daerah dalam hal ini pemeritnahan kecamatan Mataram untuk melaksanakan *capacity building* dengan tujuan memperbaiki dan memperbarui sistem yang ada agar lebih dari sebelumnya. Pembaharuan system sangat dibutuhkan terutama kelurahan pagutan dengan berkoordinasi dengan pemerintahan kewilayahan kecamatan kota mataram. Tentunya dengan mempertimbangkan permasalahan mitra yang akan diberikan penjelasan atau uraian.

## **METODE PENGABDIAN**

Pada kegiatan ini yang dijadikan subjeknya adalah pemerintah desa setempat dan masyarakat Desa Hu,u yang seharusnya tahu dan paham terkait ide dan dukungan yang bisa mereka lakukan untuk lebih mengembangkan potensi wisata ini. Adapun kegiatan ini dimulai dari:

1. Pengumpulan data

Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan turun lapangan langsung ke Desa Hu,u dan melakukan wawancara serta dokumentasi dengan pihak terkait. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan kajian kepustakaan, teori dan hasil penelitian yang relevan untuk digunakan dalam perencanaan pengembangan pariwisata di des aini.

2. Analisis data

Analisis yang digunakan adalah model analisis data interaktif. Mencocokkan data yang diperoleh dilapangan dengan literatur/teori yang sesuai sebagai bahan diskusi serta memberikan solusi alternatif.

3. Pendeskripsian data dan penarikan kesimpulan

Langkah terakhir adalah melakukan uraian terhadap data yang diperoleh dan disampaikan kepada pihak terkait. Deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan keadaan yang sebenarnya terjadi dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi maupun sikap atau pandangan yang ada di masyarakat yang dianalisis dari teori pariwisata yang relevan (Nawawi, 2021). Saran dan hasilnya merupakan masukan untuk pemerintah desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data dan informasi yang sudah disepakati oleh pihak kelurahan akan menjadi dasar pembuatan data base untuk menjadi bahan MPB (musyawarah partisipasi Bersama) untuk dapat di perhatikan oleh pemerintahan kecamatan khususnya pemerintah daerah.

- a. **sosialisasi**

Pemahaman tentang pentingnya pengembangan kapasitas organisasi yang berdampingan dengan masyarakat mengharuskan setiap pemegang kekuasaan yang didalamnya harus faham mengetahui organisasi yang di Kelola. Organisasi kelurahan merupakan pelayanan publik yang paling bawah di level kecamatan selain kepala lingkungan dan RT, sehingga pemberdayaan dan materi yang seharusnya menjadi point utama secara konseprtual harus dapat difahami.

Sosialisasi dilakukan tentunya dengan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat dalam hal ini Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram sebagai sampel terahdapat perkembangan dan pemahaman sumber daya atau pengelola organisasi dalam memahami penguatan kapasitas organisasi terutama kelurahan pagutan Kota Mataram.

Kami beserta para pengabdi yang lain turut dalam rangka memberikan pemahaman serta sosialisasi terkait kapasitas organisasi yang menghadirkan beberapa perangkat lingkungan seperti kelapa lingkungan, RT/RW di masing-masing lingkungan.

Kelurahan Pagutan terdiri 5 lingkungan yang terdiri dari ; Lingkungan Presak barat lingkungan Presak timur, lingkungan Gulinten dan lingkungan Karang Genteng serta lingkungan Kebon Lauk. Masyarakat dengan berbagai culture, etnis dan budaya terlebihnya pada agama yang terdiri dari agama islam dan agama hindu.

Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penguatan kapasitas organisasi dilakukan di aula kelurahan pagutan induk yang dihadiri langsung dari narasumber kami selaku pelaksanaan pengabdian menyamapiakan materi terkait penguatan kapasitas building atau organisasi. Selama proses pelaksanaan sosialisai masyarakat antusias diberikan pemahaman bahkan seharusnya ada setiap bulan sebagai upaya dalam pengkayaan intelektual setiap perangkat lingkungan atau actor kepentingan sehingga tidak bias dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap perangkat lingkungan.

Secara konseptual sosialisai, proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisai sebagai teori mengenai peranan (role theory), karena dalam proses sosialisai diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Oleh karenanya informasi terkait penguatan kapasitas organisasi tersalurkan melalui metode pelaksanaan sosialisai dikeluarahan pagutan dalam rangkan memperkuat tugas dan fungsi disetiap lingkungan lebih-lebih pada organisasi kelurahan.

Berikut hasil dokumentasi dalam kegiatan proses pelaksanaan sosialisai dalam rangka memberikan pemahaman pengembangan kapasitas organisasi sebagai berikut ;



Berdasarkan dari hasil penyampaian sosialisai masyarakat memberikan beberapa pertanyaan terutama terkait tugas dan fungsi kepala lingkungan Ketika terjadi persoalan lingkungan seperti misalnya pernikahan berbeda agama, Ketika terjadi persoalan tersebut cenderung agama minoritas mengalah pada agama mayoritas karena mengikuti agama yang bersangkutan terutama hal ini dirasakan Ketika pernikahan terjadi dari kami yang pihak perempuan.

Dalam pandangan pemateri selaku pemberian materi disampaikan sejauh ini seharusnya menjadi catatan adalah bagaimana setiap stakeholder turut hadir dalam memberikan hasil keputusan atau hukum awig-awig yang sifatnya tidak bisa di putuskan sendiri oleh narasumber. Walaupun demikian terjadinya pernikahan berbeda agama sudah diketahui oleh yang bersangkutan sebenarnya karena konsekuensi pernikahan berbeda agama.

Dalam FKUB (forum Komunikasi Umat Bergama) Kota Mataram telah dibuat sebagai upaya menjaga kerukunan dan menghindari konflik antar agama salah satunya pernikahan yang berbeda agama. Dari pemahaman sosialisai ini pemateri memberikan pemahaman upaya dalam mengatasi perosalan tersebut melalui musyarwah Bersama terutama pelaku (yang menikah).

Selain hal tersebut menjadi persoalan, diantaranya persoalan kali yang tidak bisa terselesaikan sebagaimana berikut gambar dibawah ;



Gambar tersebut diatas menjadi catatan bahwa persoalan banjir di kali tersebut diakibatkan karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dan rendah karena membuang sampah di kali, namun demikian persoalan tersebut bukan murni dilakukan masyarakat setempat melainkan sampah bawaan dari hulu hingga sampai ke hilir. Oleh karenanya melalui penguatan kapasitas organisasi itu lah yang menjadi catatan penting sehingga koordinasi antar pemerintahan dalam hal ini lurah pagutan dengan kelurahan pagutan timur terbangun koordinasi sehingga tidak menjadi persoalan.

Secara konseptual kapasitas organisasi sebagai kemampuan pemerintah untuk menyusun, mengembangkan, memimpin dan mengendalikan, manusia, sumber daya keuangan, fisik dan informasi (Ingraham et al., 2003). Di sector sosial atau nirlaba, kapasitas organisasi merupakan seperangkat praktek manajemen, proses atau atribut yang membantu organisasi untuk memenuhi misinya (Eisinger, 2002). Hal senada diungkapkan oleh Horton et al. (2003) menjelaskan bahwa kapasitas organisasi merupakan "its potential to perform - its ability to successfully apply its skills and resources to accomplish its goals and satisfy its stakeholders' expectations". Pada konsep ini terlihat dengan jelas kaitan lingkungan eksternal organisasi dalam aktivitas organisasi.

Dalam perkembangannya, konsep kapasitas organisasi memiliki banyak sudut pandang menurut para ahli. Ada yang menjelaskan bahwa makna kapasitas hanya sebagai masalah akuisisi sumber daya atau dana (Kushner dan Poole, 1996; Brooks, 2002). Pendapat lain menjelaskan bahwa kapasitas mencakup setiap kualitas yang dapat menghambat atau mempromosikan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi (Chaskin, 2001). Di sisi lain, kapasitas organisasi terkadang didefinisikan sebagai kualitas internal organisasi, yang terdiri dari sumber daya manusia dan modal (Brinkerhoff, 2005) dan pada pendapat lain dianggap sebagai konsep dengan dimensi baik internal maupun eksternal, misalnya dukungan keuangan eksternal, jaringan hubungan yang mendukung, sumber pelatihan, dan dukungan politik (Forbes dan Lynn, 2006).

Pengembangan kapasitas organisasi tidak hanya multidimensional, tetapi juga mampu menjadi dibagi menjadi kategori fungsional yang berbeda. Eisinger (2002), misalnya mendefinisikan elemen-elemen penting dari kapasitas organisasi sosial sebagai sumber daya, kepemimpinan yang efektif, keterampilan dan kecukupan staf, kelembagaan dan hubungan eksternal. Sedangkan Ingraham et al. (2003) menggambarkan empat subsistem manajemen yang dimensi kapasitas organisasi pemerintah, yakni keuangan, sumber daya manusia, modal dan sistem teknologi informasi.

Konsep diatas tersebut berangkat dalam tataran lapangan dan menjadi dasar dalam bertindak disamping adanya regulasi atau aturan setiap perangkat lingkungan maupun pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga Ketika penguatan organisasi baik dair siste,. Sdm dan fisik terbentuk dan berjalan dengan baik maka akan lahir organisasi yang dikelola dengan baik sesuai dengan harapan dan lingkungan sosial disekitarnya. Karena tumbuh kembangnya organisasi tergantung situasi lingkungan dan masyarakat dapat turut

hadir serta merasa memiliki dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk memajukan lingkungan masing-masing.

#### **b. Stakeholder yang terlibat**

Aktor yang terlibat dalam kesuksesan menciptakan lingkungan baca adalah dengan berkoordinasi dengan RT di lingkungan presak barat 01-05 di setiap masing-masing lingkungan untuk memberikan pemahaman bahwa penguatan kapasitas organisasi lebih lebih dalam memahami tugas dan fungsi dari masing-masing kepala lingkungan hingga RT dapat difahami dengan baik. Harapannya melalui garis koordinasi yang diciptakan melahirkan pemahaman dan kerjasama yang baik dengan antar lingkungan untuk memajukan organisasi pemerintahan dalam hal ini kelurahan pagutan mataram.

Keterlibatan actor juga dilihat masih minim dengan keikutsertaa beberapa kelurahan dalam mengatasi permasalahan setiap lingkungan yang terjadi seperti persoalan sampah bawaan yang mengalir dari hulu ke hilir sehingga membuat lingkungan yang berada di hilir menerima dampak akiibat membuat sampah seperti terjadi banjir, bau busuk yang mengakibatkan tidak kondusifitasnya lingkungan yang tercipta. Oleh karenanya hal ini perlu dilakukan dengan pengautan kapasitas organisasi dan koordinasi setiap kelurahan lingkungan dan stakeholder yang terkait guna menciptakan pelayanan publik yang sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Pengembangan kapasitas organisasi kelurahan melalui dua alternatif digunakan diantaranya melalui sosialisasi dan stakeholder yang terlibat. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan persepsi dan menghasilkan kepedulian masyarakat terutama sektor pemerintahan kelurahan membutuhkan keilmuan secara ideal dan normative tentang capacity building. Capacity building menjadi bahan dan dasar dalam mensukseskan pelayanan publik yang langsung berhadapan pada pelayanan kepada masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Grindle, M.S., (editor), (1997) *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA : Harvard Institute for International Development.
- [2] Hardjanto, Imam, (2006) *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- [3] Kaho Josef Riwu, (1991) *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- [4] Milen, Anelli, (2004) *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.